STRATEGI DIGITALISASI NASKAH KUNO SEBAGAI UPAYA REAKTUALISASI PENGETAHUAN LOKAL DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MUSEUM RADYA PUSTAKA SURAKARTA

Romadon Ade Bintoro[1], Irma Ayu Kartika Dewi[2], Mega Alif Marintan[3], Khoirul Maslahah[4], Alifia Rachma Aghan[5]
[1 2 3 4 5]*Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*
Corresponding author: romdonadebintoro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai urgensi bahwa pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan intelektual tinggi, namun memiliki kerentanan terhadap kerusakan fisik maupun potensi penyalahgunaan di tengah perkembangan teknologi digital. Museum Radya Pustaka Surakarta sebagai salah satu institusi yang berperan dalam pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan informasi sekaligus menjaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada naskah kuno dari potensi pelanggaran akibat kemudahan reproduksi dan distribusi dalam bentuk digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi digitalisasi yang tidak hanya berorientasi pada preservasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pengelolaan naskah kuno di Museum Radya Pustaka Surakarta. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi proses digitalisasi, bentuk perlindungan HKI yang diterapkan, serta berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap identifikasi, pemindaian, pengolahan, hingga penyimpanan dalam format digital. Meskipun demikian, pengelolaan hasil digitalisasi masih relatif sederhana dan belum terintegrasi secara optimal, khususnya dalam aspek metadata, penyimpanan, dan distribusi. Perlindungan HKI telah dilakukan melalui pembatasan akses dan pemberian watermark, tetapi penerapannya masih bersifat konvensional dan belum didukung secara optimal oleh teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) maupun enkripsi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi digitalisasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu mengakomodasi aspek preservasi, perlindungan HKI, keamanan informasi, serta pemanfaatan naskah kuno secara berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi, Naskah Kuno, Perlindungan HKI, Museum Radya Pustaka Surakarta

A. PENDAHULUAN

Pelestarian warisan budaya merupakan upaya penting untuk menjaga identitas, sejarah, dan pengetahuan suatu bangsa. Naskah kuno sebagai salah satu warisan budaya memiliki nilai historis, intelektual, dan kultural karena memuat informasi mengenai perkembangan peradaban, bahasa, kepercayaan, hukum adat, serta ilmu pengetahuan

masa lampau. Oleh karena itu, keberadaan naskah kuno perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Museum Radya Pustaka Surakarta memiliki peran penting dalam melestarikan koleksi naskah kuno, namun menghadapi berbagai tantangan, seperti kerentanan fisik naskah akibat usia dan faktor lingkungan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk memperluas akses informasi, tetapi juga menimbulkan risiko reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan naskah tanpa izin yang dapat berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Digitalisasi menjadi salah satu strategi untuk menjaga informasi yang terkandung dalam naskah kuno sekaligus mendukung perlindungan HKI melalui penerapan watermark, pembatasan akses, dan pengelolaan penggunaan koleksi digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi digitalisasi naskah kuno di Museum Radya Pustaka Surakarta penting dilakukan untuk memahami praktik, tantangan, serta pengembangan strategi digitalisasi yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi naskah kuno pada umumnya menjadi bagian penting dalam upaya preservasi informasi dan pengelolaan warisan budaya. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti (Khairunnisa, 2025; Khadjah et al., 2021; Ilyasa, 2025; Muhaemin, 2024), menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menjaga keberlanjutan informasi, mengurangi penggunaan naskah asli, mendukung pengelolaan koleksi digital, serta membuka akses yang lebih luas. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan digitalisasi sebagai upaya pelestarian naskah kuno, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang lebih menekankan preservasi, proses digitalisasi, strategi pengelolaan, dan tantangan pelaksanaannya. Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah terbukti penting bagi pelestarian naskah kuno, tetapi belum sepenuhnya membahas keterkaitannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa strategi digitalisasi memiliki tahapan dan tantangan yang beragam. (Khairunnisa 2025) menekankan digitalisasi

sebagai upaya penyelamatan informasi sejarah Islam, (Khadjah et al. 2021) menyoroti pelestarian informasi dan pengurangan penggunaan naskah asli, (Ilyasa 2025) membahas identifikasi, pemindaian, pengelolaan data, dan pengaturan akses, sedangkan (Muhaemin 2024) mengkaji potensi serta kendala berupa sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengelolaan koleksi digital. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas digitalisasi naskah kuno, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan aspek keamanan data dan perlindungan HKI melalui mekanisme seperti watermark, DRM, enkripsi, dan pengelolaan akses. Oleh sebab itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan kajian digitalisasi yang tidak hanya berorientasi pada preservasi, tetapi juga pada perlindungan hasil digitalisasi.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang penelitian mengenai integrasi strategi digitalisasi naskah kuno sebagai upaya reaktualisasi pengetahuan lokal dan perlindungan HKI dalam pengelolaan naskah kuno. Penelitian ini kemudian memfokuskan kajian pada strategi digitalisasi naskah kuno sebagai upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Museum Radya Pustaka Surakarta dengan memperhatikan aspek preservasi, pengelolaan akses, keamanan data, watermark, DRM, enkripsi, dan metadata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dalam menghubungkan proses digitalisasi dengan perlindungan hak dan keamanan koleksi digital, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi digitalisasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

C. LANDASAN TEORI

Digitalisasi naskah kuno merupakan strategi pelestarian yang bertujuan menjaga keberlanjutan informasi dan warisan budaya. Dalam perspektif preservasi, pelestarian tidak hanya berorientasi pada kondisi fisik naskah, tetapi juga pada keberlangsungan kandungan informasinya melalui alih media digital (Mudassir et al., 2020). Proses tersebut memerlukan strategi yang terarah, sehingga konsep strategi 5P Mintzberg plan, ploy, pattern, position, dan perspective digunakan untuk memahami perencanaan dan pelaksanaan digitalisasi, sedangkan teori digitalisasi menjelaskan tahapan pengelolaan koleksi mulai dari identifikasi, pemindaian, metadata, penyimpanan, hingga pengaturan

akses (Mintzberg, 1987; Khadjah et al., 2021). Dengan demikian, preservasi, strategi, dan digitalisasi menjadi landasan untuk menganalisis pengelolaan naskah kuno secara sistematis.

Naskah kuno merupakan sumber pengetahuan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan intelektual sehingga pelestariannya perlu memperhatikan makna informasi yang terkandung di dalamnya (Mulyanto, 2023). Dalam konteks tersebut, reaktualisasi digunakan untuk memahami dan menghubungkan pengetahuan masa lalu dengan kebutuhan masa kini, sedangkan konsep pengetahuan lokal memandang naskah sebagai representasi nilai, makna, dan pengalaman masyarakat dalam konteks budayanya (Sjadzali, 1990; Geertz, 1983). Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelamatan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan mengaktualisasikan kembali pengetahuan lokal agar tetap relevan.

Hasil digitalisasi juga memerlukan perlindungan karena koleksi digital berpotensi mengalami reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan tanpa izin. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui watermark, pembatasan akses, pengelolaan lisensi, Digital Rights Management (DRM), enkripsi, dan pengamanan data digital (Diehl, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, teori preservasi, strategi, digitalisasi, naskah kuno, reaktualisasi, pengetahuan lokal, dan HKI digunakan secara terpadu untuk menganalisis strategi digitalisasi naskah kuno sebagai upaya reaktualisasi pengetahuan lokal sekaligus perlindungan HKI di Museum Radya Pustaka Surakarta.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi digitalisasi naskah kuno dan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Museum Radya Pustaka Surakarta berdasarkan kondisi alamiah di lapangan (Sugiyono 2008). Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan menggambarkan proses digitalisasi, pengelolaan hasil digital, pengaturan akses, keamanan data, perlindungan HKI, serta hambatan yang dihadapi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pihak yang terlibat para tenaga kerja di Museum Radya Pustaka

Surakarta, observasi untuk melihat praktik secara langsung, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung. Penggunaan ketiga teknik tersebut secara terpadu diharapkan menghasilkan data yang lebih lengkap, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Digitalisasi sebagai Dasar Pelestarian

Digitalisasi naskah kuno pada dasarnya merupakan strategi pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada perubahan bentuk fisik menjadi digital, tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan informasi yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian di Museum Radya Pustaka Surakarta, kegiatan digitalisasi dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi, pemindaian atau fotografi, pengolahan hasil, pemeriksaan kualitas, serta penyimpanan file digital. Tahapan tersebut menunjukkan adanya pola kerja yang diarahkan untuk mempertahankan keberadaan informasi naskah, meskipun sistem pengelolaan hasil digital belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi telah menjadi bagian penting dari strategi preservasi koleksi naskah kuno di Museum Radya Pustaka Surakarta (Kenney & Rieger, 2000).

2. Identifikasi sebagai Dasar Penentuan Prioritas

Setiap strategi digitalisasi memerlukan perencanaan agar proses pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan koleksi. Museum melakukan identifikasi dan inventarisasi dengan mempertimbangkan kondisi fisik, tingkat kerusakan, keberadaan naskah dalam katalog, serta nilai penting yang terkandung di dalamnya. Naskah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi menjadi salah satu prioritas untuk dialih mediakan, sedangkan katalog digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberadaan dan kondisi koleksi sebelum digitalisasi dilakukan. Dalam perspektif Mintzberg, proses tersebut mencerminkan strategi sebagai plan, karena terdapat pertimbangan dan perencanaan dalam menentukan tindakan terhadap koleksi. Oleh sebab itu, identifikasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam menentukan naskah yang perlu diprioritaskan untuk dilestarikan dan dimanfaatkan kembali (Mintzberg, 1987).

3. Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Proses digitalisasi yang berkualitas harus memperhatikan lebih dari sekadar kegiatan menghasilkan salinan visual naskah. Berdasarkan hasil penelitian, pemindaian atau fotografi dilakukan secara bertahap dan setiap hasil diperiksa kembali untuk memastikan kualitas gambar, sehingga dokumentasi dapat diulang apabila hasilnya kurang jelas atau mengalami blur. Namun, keberlanjutan objek digital juga dipengaruhi oleh pengelolaan format file, metadata, sistem penyimpanan, keamanan, dan keberlangsungan akses. Oleh karena itu, digitalisasi yang dilakukan Museum Radya Pustaka perlu dipahami sebagai bagian dari proses pengelolaan informasi digital secara menyeluruh, bukan hanya sebagai kegiatan alih media dari naskah fisik ke bentuk digital (Library of Congress, 2025).

4. Digitalisasi sebagai Sarana Reaktualisasi Pengetahuan Lokal

Digitalisasi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar melindungi naskah asli dari kerusakan akibat penggunaan secara langsung. Naskah kuno mengandung rekaman mengenai pemikiran, bahasa, sejarah, nilai sosial, dan pengetahuan masyarakat yang dapat dipelajari kembali oleh generasi masa kini. Melalui bentuk digital, informasi tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diakses, dikaji, dan dimanfaatkan tanpa meningkatkan intensitas penggunaan terhadap koleksi asli. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi pintu masuk bagi proses reaktualisasi pengetahuan lokal, yaitu upaya menghadirkan kembali pengetahuan masa lalu agar tetap dapat dipahami dan memiliki relevansi dalam kehidupan kontemporer (Kenney & Rieger, 2000; UNESCO, 2015).

5. Pengolahan Isi sebagai Tahap Reaktualisasi

Reaktualisasi pengetahuan lokal tidak akan tercapai secara optimal apabila hasil digitalisasi hanya berhenti pada penyimpanan citra naskah. Agar informasi yang terkandung di dalam naskah dapat dipahami oleh masyarakat modern, diperlukan proses lanjutan seperti penyusunan metadata, transliterasi, alih aksara, penerjemahan, pemberian konteks, serta interpretasi terhadap isi naskah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Radya Pustaka telah melakukan transliterasi dan alih aksara, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tersedianya bentuk digital belum secara otomatis menjamin keterbukaan akses terhadap substansi pengetahuan yang terkandung di dalam

naskah. Oleh karena itu, digitalisasi perlu diikuti dengan pengolahan informasi agar naskah dapat berkembang dari sekadar objek koleksi menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat (UNESCO, 2015).

6. Aksesibilitas dan Pemanfaatan Pengetahuan

Akses terhadap informasi merupakan salah satu syarat penting dalam proses reaktualisasi pengetahuan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hasil digitalisasi di Museum Radya Pustaka masih terbatas dan belum sepenuhnya menggunakan sistem digital yang terintegrasi, karena sebagian data masih disimpan pada media seperti komputer lokal dan harddisk. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara keberhasilan proses digitalisasi dan pemanfaatan hasil digital oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan metadata yang konsisten, katalog atau repositori digital, serta penyediaan ringkasan dan konteks isi naskah diperlukan untuk meningkatkan temu kembali dan pemanfaatan informasi. Dengan demikian, semakin mudah pengetahuan ditemukan dan dipahami, semakin besar pula peluang digitalisasi untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan penguatan identitas budaya (UNESCO, 2015).

7. Perlindungan HKI dalam Hasil Digitalisasi

Perluasan akses digital juga menimbulkan risiko terhadap penggunaan dan distribusi naskah secara tidak sah. Hasil digital dapat lebih mudah disalin, dimodifikasi, disebarluaskan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa adanya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, Museum Radya Pustaka telah menerapkan bentuk perlindungan awal melalui pemberian watermark, pembatasan akses, dan pengawasan terhadap penggunaan data. Namun, perlindungan tersebut masih belum didukung secara optimal oleh teknologi keamanan digital yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam strategi digitalisasi agar pemanfaatan naskah digital tetap berada dalam batas penggunaan yang legal dan bertanggung jawab (Diehl, 2012; Undang-Undang Nomor 5, 2017 Pemajuan Kebudayaan).

8. Perlindungan Digital melalui Sistem Berlapis

Perlindungan terhadap hasil digitalisasi sebaiknya dilakukan melalui beberapa mekanisme yang saling melengkapi. Watermark dapat digunakan sebagai penanda

identitas atau kepemilikan, tetapi penggunaannya belum tentu mampu mencegah seluruh bentuk penggandaan dan distribusi ilegal. Oleh sebab itu, watermark perlu dikombinasikan dengan pembatasan akses, enkripsi, Digital Rights Management (DRM), metadata hak, serta kebijakan lisensi penggunaan koleksi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah akses bertingkat, yaitu menyediakan informasi umum dan gambar beresolusi terbatas bagi publik, akses lebih lengkap bagi peneliti melalui prosedur tertentu, serta pembatasan ketat terhadap file master yang digunakan untuk kepentingan internal. Dengan demikian, sistem perlindungan berlapis dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan akses informasi dengan pengendalian terhadap risiko penyalahgunaan (Diehl, 2012; Library of Congress, 2025).

9. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Digitalisasi

Keberhasilan strategi digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga yang memiliki kemampuan dalam digitalisasi, pengelolaan metadata, keamanan informasi, filologi, transliterasi, dan alih aksara menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan program. Selain itu, sistem penyimpanan dan backup masih memerlukan pengembangan agar keamanan dan keberlanjutan data dapat terjamin dalam jangka panjang, sementara keterbatasan anggaran turut memengaruhi pengadaan peralatan dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, hambatan tersebut saling berkaitan dan membentuk tantangan yang memengaruhi kualitas digitalisasi, reaktualisasi pengetahuan, serta penerapan perlindungan HKI secara menyeluruh (Kenney & Rieger, 2000; Library of Congress, 2025).

10. Strategi Terintegrasi untuk Preservasi, Reaktualisasi, dan Perlindungan HKI

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, strategi digitalisasi naskah kuno di Museum Radya Pustaka Surakarta perlu dikembangkan melalui integrasi tiga orientasi utama, yaitu preservasi, reaktualisasi pengetahuan lokal, dan perlindungan HKI. Orientasi preservasi dilakukan melalui penentuan prioritas koleksi, pengendalian kualitas hasil digital, serta pengembangan sistem penyimpanan dan backup yang berkelanjutan. Orientasi reaktualisasi dapat diwujudkan melalui pengembangan metadata, transliterasi, alih aksara, penerjemahan, interpretasi, dan pemanfaatan naskah

untuk pendidikan maupun penelitian, sedangkan orientasi perlindungan HKI dapat diperkuat melalui watermark, akses bertingkat, DRM, enkripsi, metadata hak, dan kebijakan lisensi. Dengan demikian, digitalisasi yang terintegrasi tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan informasi naskah kuno, tetapi juga memungkinkan pengetahuan lokal tetap hidup, dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, dan terlindungi dalam lingkungan digital (UNESCO, 2015; Diehl, 2012; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta).

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi digitalisasi naskah kuno di Museum Radya Pustaka Surakarta merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan warisan dokumenter dan informasi yang terkandung di dalamnya. Proses digitalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi, penentuan prioritas koleksi, pemindaian atau pengambilan gambar digital, pengolahan, hingga penyimpanan hasil digital. Pelaksanaan digitalisasi tersebut berkontribusi terhadap pelestarian naskah karena dapat mengurangi intensitas penggunaan koleksi asli serta menjaga informasi agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi kegiatan alih media, tetapi juga menjadi bagian dari strategi preservasi naskah kuno secara berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mencapai tahap pemanfaatan pengetahuan secara optimal. Agar pengetahuan lokal yang terkandung dalam naskah dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat masa kini, diperlukan pengembangan metadata, transliterasi, alih aksara, interpretasi isi, serta penyediaan akses yang sesuai. Proses tersebut memungkinkan naskah kuno tidak hanya dipandang sebagai koleksi budaya, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, dan penguatan identitas budaya. Oleh karena itu, digitalisasi dapat menjadi sarana reaktualisasi pengetahuan lokal dengan menghubungkan warisan pengetahuan masa lalu dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (UNESCO, 2015).

Selain mendukung preservasi dan reaktualisasi pengetahuan lokal, perluasan akses terhadap hasil digitalisasi juga memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

agar koleksi tidak digunakan secara tidak sah. Penerapan watermark dan pembatasan akses perlu diperkuat melalui metadata hak, akses bertingkat, sistem penyimpanan yang aman, serta pengembangan perlindungan digital untuk menjaga keberlanjutan dan pengendalian penggunaan objek digital (Diehl, 2012). Keberhasilan strategi tersebut juga bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan metadata, serta kerja sama dengan akademisi, filolog, dan komunitas budaya. Dengan demikian, integrasi antara preservasi digital, akses informasi, reaktualisasi pengetahuan lokal, dan perlindungan HKI dapat menjadikan naskah kuno sebagai warisan budaya yang tidak hanya terlestarikan, tetapi juga tetap hidup, terlindungi, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Diehl, E. (2012). Securing digital video: Techniques for DRM and content protection. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17345-5

Geertz, C. (1983). Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. Basic Books.

Ilyasa, D. (2025). Proses dan strategi digitalisasi naskah kuno di Museum Sri Baduga. UNILIB: Jurnal Perpustakaan, 16(2), 147–160. https://doi.org/10.20885/unilib.Vol16.iss2.art3

Kenney, A. R., & Rieger, O. Y. (2000). Moving theory into practice: Digital imaging for libraries and archives. Research Libraries Group.

Khairunnisa, C. A. (2025). The digitalization process of manuscripts as preservation and salvage of Islamic historical information sources in Aceh. Indonesian Journal of Islamic History and Culture, 6(1), 34–44. https://doi.org/10.22373/ijihc.v6i1.7509

Library of Congress. (2025). Statement 2025–2026. Library of Congress.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California Management Review, 30(1), 11–24. https://doi.org/10.2307/41165263

Muhaemin. (2024). Potensi dan tantangan naskah kuno di Indonesia sebagai warisan budaya digital: Narrative literature review. Pustabiblia: Journal of Library and Information Science, 8(1), 1–17. https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v8i1.1-17

Sjadzali, M. (1990). Islam dan tatanegara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran. Penerbit Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form.